

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Muhammad Asrun, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah* Soeharto, Jakarta, Elsam.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Alfitra Salam, 2005, *Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI.
- Anton M. Moeliono, dkk., 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII.
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi Cetakan Kedua*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Bagir Manan, 1974, *Beberapa Hal di Sekitar Otonomi Daerah Sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan*, Bandung, Bina Cipta.
- Farid Abdul Khaliq, 2005, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi' Dusturriyah Asy Syura Al'Adl Al Musawah*, diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid dengan judul *Fikih Politik Islam*, Jakarta, AMZAH.
- Irawan Soejito, 1983, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta, Bina Aksara.
- J. Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Ekonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Local dan Tantangan Global*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jimly Asshidiqie, 2001, *Pengantar Pemikiran Perubahan UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945*, Jakarta, The Habibie Center.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press kerjasama dengan PT Syamil Cipta Media.
- Josef Riwo Kalo, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- King Faisal Sulaiman, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2009, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Musanef, 1985, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- R.M.A.B Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- S. Prayudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh*, Jakarta, Ghala Indonesia
- Sujamto, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.

Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Syamsuddin Haris, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta, LIPI Press.
Timur Mahardika, *Tarik Ulur Relasi Pusat-Daerah; Perkembangan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kritis*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.
Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Jurnal

Indah Dwi Qurbani, 2014, Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol 9, No 2.

Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat- Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No 4.

Septi Nur Wijayanti, 2016, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, No.2.

Ni Made Ayu Purwati, I Gede Artha, 2016, Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum*, Vol 04 No.05

Yuri Sulisty, Antikowati, & Rosita Indrayanti, 2014, Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.01. No.01

Pika Julianti, 2016, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, *Jurnal Hukum*, Vol 3, No 2.

Michael Barama, 2016, Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 22, No 5.

Eko Noer Krisyanto, 2012, Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1, No 3.

Telly Sumbu, 2010, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, *Jurnal Hukum*, Vol 4, No 17.

Rasyid Taha, 2012, Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, Vol 1, No 3.

Amrizal J.Prang, 2011, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13, No 1.

Skripsi

Febby Fajrurrahman, 2007, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik, Malang, Universitas Brawijaya.